

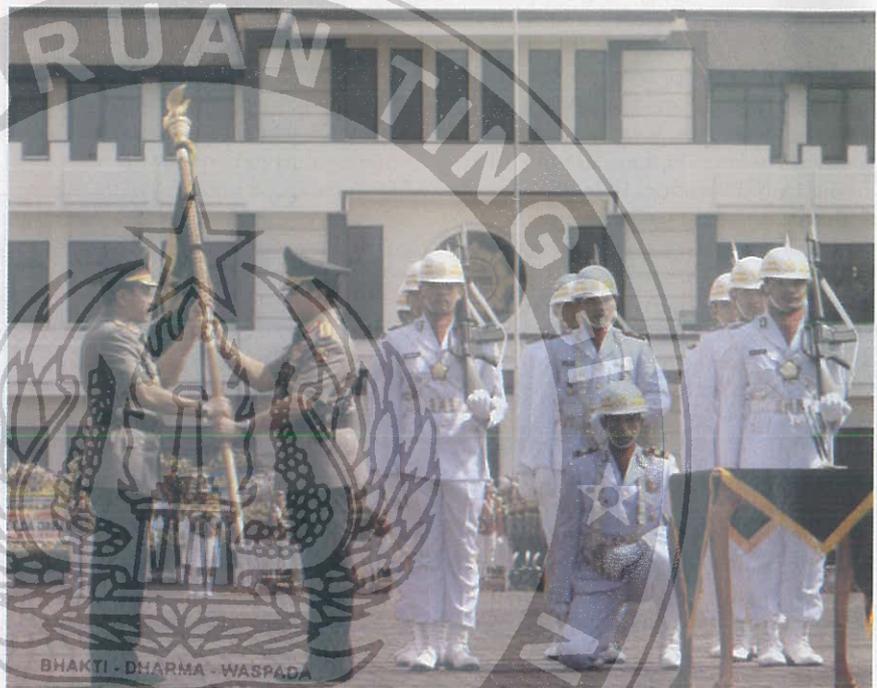
245

MENITIPKAN ASA KEPADA KAPOLRI BARU

Oleh J. Sitanggang SH

PERJALANAN Polri yang sekarang sudah sampai pada usianya yang ke 64 tahun, diwarnai oleh berbagai macam perubahan, baik dalam segi tatanan ketatanegaraan maupun sosio cultural.

Bicara tentang sejarah perjalanan Polri, tentu saja tak terlepas dari sejarah perjalanan panjang republik negeri ini. Dari awal ketika Polri dibentuk PPKI, administratifnya di bawah Departemen Dalam Negeri dan perasional di bawah kejaksaan. Kemudian Polri menjadi sebuah Departemen Kepolisian yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.



Dengan alasan historis dimana sejak dari kelahirannya Polri sudah terlibat langsung dalam berbagai pertempuran melawan penjajah bersama dengan Tentara Nasional Indonesia, pemerintah kemudian menjadikan Polri sebagai bagian dari Angkatan Bersenjata atau ABRI. Dalam kurun waktu ini, Polri dan segala kebijakan maupun culturalnya pun identik dengan militer. Sejarah pun bergulir hingga terjadinya reformasi tahun 1998 yang menjadi tonggak penting perjalanan Polri yang diikuti oleh pisahnya Polri dari ABRI.

Polri pun sampai pada era

baru, dimana Polri menjadi sebuah organisasi yang mandiri dengan ruang lingkup tugas dan kewenangan yang begitu luas sebagaimana yang tertuang di dalam UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, keluarnya Polri dari TNI, mendapat sebuah konsekuensi yang amat berat, yakni amanat rakyat yang menginginkan terbentuknya Polri yang mandiri dan Profesional serta tidak terkooptasi dengan militer.

Harapan masyarakat tentang Polri yang mandiri dan professional tentu saja tidak muncul begitu saja. Selama bernaung di bawah ABRI, tak ayal Polri terjebak di dalam

sebuah kultur yang kaku dan keras. Bahkan sampai kini, kultur tersebut masih melekat jelas di dalam keseharian sebagian anggota Polri.

Di awal reformasi, merupakan masa-masa sulit bagi Polri di dalam implementasi pelaksanaan tugas sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayan masyarakat serta Penegak hukum. Polri terbebani dengan harapan besar masyarakat untuk sesegera mungkin menjadi Polisi yang berwatak sipil. Pada saat yang sama, terbukanya keran Reformasi menjadikan euphoria kebebasan di tengah-tengah masyarakat hingga reformasi pun menjadi kebablasan, sehingga Polri acapkali mengalami

benturan dengan kehendak masyarakat.. Di sisi lain, selama berpuluh tahun berada satu gerbong dengan militer, bukan perkara mudah untuk menanggalkan kultur sebagai penguasa. Jangankan sebagai "Pelayan" yang seyogyanya harus merendah, duduk setara dengan rakyat pun menjadi sesuatu hal yang sulit.

Sebenarnya pimpinan Polri bukanlah berdiam diri dalam membenahi institusi Polri. Berbagai langkah dan kebijakan sudah diambil guna mempercepat proses transisi dan perubahan terutama menyangkut Instrumental, Struktural dan Cultural. Namun, harapan tak selalu berujung menjadi kenyataan. Perubahan cultural yang diharapkan setelah satu dasawarsa pisahnya Polri dengan ABRI masih jauh dari harapan masyarakat.

WAJAH POLRI KINI

Pisahannya Polri dari TNI pada awalnya mendapat tanggapan positif dari berbagai kalangan. Namun, belakangan dengan bermunculannya sejumlah kasus baik internal maupun eksternal, kemandirian dan independensi Polri mulai disinggung lagi. Munculnya kasus-kasus dugaan korupsi dan suap di lingkungan internal, semakin menguatkan kewenangan yang diberikan kepada Polri terlalu berlebihan.

Selain itu terjadinya konflik antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terjadi belum lama ini, seringnya terjadi penyalahgunaan wewenang oleh anggota Polri di dalam penegakan hukum, dan juga terjadi bentrokan antara anggota TNI dan Polri di lapangan, dianggap merupakan gejala arogansi dan ketiadaan kontrol terhadap anggota Polri.

Hal ini mendorong berbagai



pihak terutama lembaga-lembaga yang getol dalam mengkritisi kinerja Polisi selama ini untuk merevisi UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Posisi Polri pun dalam struktur ketatanegaraan kemudian diperdebatkan dan disarankan agar Polri ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan atau Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

Entah faktor apa, harapan masyarakat terhadap Polri yang mandiri, profesional dan berwatak sipil masih jauh dari kenyataan. Apakah karena jumlah Polisi yang menurut rasio dengan jumlah penduduk Indonesia yang tidak seimbang? Ataukah karena begitu kompleks dan luasnya tugas dalam konflik kepentingan Politik? Atau kondisi Sosial masyarakat yang sedemikian rupa sehingga perubahan polisi harus seiring dengan perubahan yang terjadi pada masyarakat?

Namun, apapun jawabannya, melihat Polri saat ini yang menurut hasil beberapa survei mengatakan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Polri saat ini berada pada titik nadir. Mari lupakan survei. Tanpa survei pun, Polri memang ada di dalam posisi sulit saat ini. Berbagai situasi dan kejadian

pun silih berganti menimpa Polri. Stigma negatif terhadap institusi Polri seolah tiap hari menggelinding.

Terbukanya keran informasi terhadap publik, baik dari media cetak maupun televisi pada saat ini, semakin mempermudah masyarakat untuk mengikuti berita Polri detik demi detik. Bahkan hal sekecil apapun tidak bisa lagi tersembunyikan dari pandangan masyarakat terutama menyangkut pelanggaran hukum oleh anggota Polri. Memang Polri tak bisa lari dari kenyataan. Sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang, Polri mempunyai tugas dan tanggung jawab yang amat berat. Menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat sekaligus penegak hukum, bukanlah tugas yang mudah meskipun tak mustahil dilaksanakan.

Masyarakat memang berharap banyak kepada Polri. Terpuruknya perekonomian bangsa pada awal reformasi yang diikuti dengan krisis multidimensional, mendorong masyarakat meletakkan asa di pundak Polri terutama di bidang penegakan hukum. Polri diharapkan mampu mengawal reformasi, menegakkan hukum tanpa pandang bulu dan menjadikan hukum sebagai Panglima.

Namun, sekali lagi, tanggung

jawab yang demikian besar itu gagal terwujud. Korupsi yang menggurita dan meluluhlantakkan pondasi perekonomian bangsa kita seolah berhenti di tangan Polri. Dan yang lebih memprihatinkan adalah berdasarkan survey Lembaga Transparansi Internasional Indonesia (TII) pada tahun 2007 yang lalu menempatkan Polri menjadi salah satu lembaga terkorup di negeri ini. Sungguh ironis, bagai pagar makan tanaman.

Kondisi ini pun semakin diperparah dengan gencarnya pemberitaan negative mengenai Polri akhir-akhir ini yang seperti tiada habisnya. Sorotan publik tak pelak, semakin menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri bahkan sampai ke titik terendah. Berbagai macam upaya yang sudah ditempuh pimpinan Polri guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri pun laksana membentur karang. Sebutlah program Grand Strategy Polri tahap pertama yaitu Quick Wins (Quick response, transparansi penyidikan, transparansi penyelenggaraan SIM, STNK dan BPKB dan transparansi seleksi masuk anggota Polri) yang bermuara kepada trust building dan telah berakhir pada awal 2010. Tak jelas apa tolok ukur keberhasilan yang

dicapai dengan program tersebut sehingga dilanjutkan kepada tahap berikutnya partnership building (membangun kemitraan).

ASA KEPADA KAPOLRI BARU

Tak mudah memang menguraikan, mengapa Polri begitu banyak menuai kecaman publik. Bahkan keberhasilan Polri dalam pemberantasan narkoba dan terorisme seolah hilang dengan berbagai peristiwa yang timbul belakangan ini. Bahkan berbagai macam pencapaian tersebut sebahagian malah berbuah curiga di mata masyarakat. Suasana itu berbaur dengan situasi politik yang riuh di negeri ini yang bergulir sejak mencuatnya skandal Bank Century.

Penyelesaian kasus tersebut menggelinding menjadi salah satu pekerjaan Polri untuk menuntaskannya, yang membuat posisi Polri bagai buah simalakama, maju kena mundur Kena. Situasi ini diperparah dengan munculnya dugaan kriminalisasi terhadap dua pimpinan KPK yang merembet pula sampai ke institusi Polri. Pada titik inilah puncak ketidakpuasan masyarakat terhadap institusi Polri.

Meminjam istilah perang, posisi Polri berada di ujung tanduk menjadi sasaran empuk

dan bulan-bulanan musuh. Ibarat pepatah, Satu berbuat...semua kena getahnya. Kejadian –kejadian yang terjadi di tingkat atas, mau tidak mau mesti ditanggung oleh segenap jajaran Polri di seluruh negeri. Masyarakat pun tak pantas untuk dipersalahkan, sebab perbuatan yang dilakukan sebagian anggota Polri tersebut menurut mereka adalah sebagai gambaran dan cerminan dari tindakan seluruh personil Polri dimanapun berada. Padahal tidaklah demikian. Kejadian tersebut mungkin saja sebagai gambaran ambisi pribadi dan rivalitas yang tidak sehat di tubuh Polri yang tanpa disadari menyeret institusi.

Pergantian Kapolri yang baru saja berlangsung menjadi sebuah momentum membangun kembali Polri yang dicintai masyarakat. Mengingat beragam persoalan yang membelenggu akhir – akhir ini, memang amat berat tugas yang akan diemban oleh siapa pun yang menjadi Kapolri baru. Yang paling sulit adalah membenahi internal kepolisian, terutama menyangkut dugaan penyimpangan yang selama ini sering diberitakan oleh media. Sebuah pilihan yang sulit ketika siapa pun dihadapkan untuk melakukan pembersihan apalagi sampai mengambil tindakan hukum tegas di rumah sendiri.

Belum lagi membenahi manajemen Kepolisian yang belum menemukan trek yang memenuhi harapan bagi kemajuan Polri secara keseluruhan. Dibutuhkan sebuah keberanian yang luar biasa untuk mengadakan perubahan yang berkesinambungan. Sebagaimana disarankan oleh Irjen Pol Purn Farouk Muhammad yang juga anggota DPD RI, dalam tulisannya "Selamat datang Kapolri Baru", Untuk mencapai Polri idaman, Kapolri baru kelak harus mencanangkan reformasi jilid II bagi Kepolisian (Kompas, 6 Oktober 2010).

Namun reformasi pun tak bisa hanya sekedar reformasi biasa yang harus tunduk pada rambu – rambu yang lama. Reformasi yang diharapkan adalah reformasi total



dan mungkin harus radikal. Kalau boleh berandai-andai, Kapolri nanti harus lah "manusia setengah dewa" sehingga bisa membawa kembali Polri ke jalur yang diharapkan masyarakat. Harapan masyarakat tentang hadirnya sosok Kapolri yang baru, memang seolah sudah menjadi sebuah jaminan bahwa Polri akan serta merta berubah. Harapan itu pun tak berlebihan mengingat betapa peran tampuk kepemimpinan di institusi Polri masih menganut system garis komando.

Dengan demikian, kebijakan dan keputusan apapun yang dibuat sang pemimpin tak bisa berubah dan mutlak harus dilaksanakan. Dibutuhkan sentuhan gaib untuk membuka mandeknya aliran perubahan di tubuh Polri, yang sekian lama terbelenggu oleh system yang kaku dan kultur lama "asal bapak senang" yang memenjarakan perasaan peka terhadap situasi dan kondisi bangsa ini. Tak lagi hanya membuat program yang semata-mata hanya untuk pencitraan namun tidak berpengaruh banyak terhadap budaya dan kinerja Polri secara keseluruhan.

Program hendaknya diarahkan untuk memacu segenap anggota Polri untuk memiliki perasaan senasib dan sepenanggungan. Mempunyai tanggung jawab bersama di dalam pengabdian kepada nusa dan bangsa ini. Tak ada lagi sekat di sana sini, suku, agama dan asal-usul, yang menciptakan perbedaan dan melunturkan semangat bersatu dalam pengabdian. Untuk menuju ke sana memang bukan perkara gampang, sebab institusi Polri ada di dalam lingkungan pemerintahan yang belum luntur dengan kultur kolusi, korupsi dan nepotisme. Untuk itulah Polri diharapkan harus tampil berbeda. Jika perlu Polri harus menjadi pelopor dalam menciptakan perbedayaan budaya kerja yang menganut nilai-nilai bangsa Indonesia sebagaimana tercantum di dalam



Pancasila. Hal ini memang tidak berlebihan, mengingat tugas dan tanggungjawab Polri yang amat besar dan menyentuh hampir seluruh lini dalam tatanan sosial kemasyarakatan.

JANGAN SETENGAH-SETENGAH

Harapan bagi tegaknya hukum di negeri tercinta ini tetap harus diperjuangkan hingga titik darah penghabisan. Dan harapan itu pun layak disematkan di pundak Kapolri baru yang menjadi nakhoda bagi 400- an ribu Polisi di negeri ini. Polisi yang menjadi aparat di garda terdepan dalam penegakan hukum, yang menjadi tumpuan harapan masyarakat di tengah-tengah situasi sulit saat ini.

Walaupun harapan itu masih jauh dalam jangkauan, namun tak mustahil bisa terwujud asalkan Polri mau membenahi diri, koreksi diri dan membuka diri bagi perubahan. Untuk itulah, Kapolri baru nanti harus memulai. Membuat garis kebijakan yang tegas dan jelas, tidak setengah-setengah. Apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh jangan sampai menjadi abu-abu, sehingga tidak menjadi bahan pergunjungan dan polemik di kemudian hari yang sangat

merugikan organisasi.

Dan akhirnya memang, Polri yang mandiri, profesional dan dicintai masyarakat tidak serta merta terwujud jika tak didukung oleh segenap anggota Polri di seluruh pelosok nusantara. Jika tak tumbuh rasa peka terhadap lingkungan sekitar. Jika rasa egoisme dan ambisi pribadi tidak dikesampingkan dan dikubur dalam-dalam. Jika semangat ESPRIT DE CORPS bisa dikelola menjadi positif. Jika segenap personil mampu menahan diri.

Namun sebaiknya harus dimulai dari atas mengalir hingga ke bawah. Dengan satu tekad yang bulat, niat yang tulus, rasa senasib sepenanggungan dan keteladanan dari sang pemimpin, niscaya Polri bisa membuktikan jati dirinya sebagai aparat penegak hukum, pelayan masyarakat serta penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang berintegritas dan dicintai oleh masyarakat. Polri pun akan mampu mengawal gerak bangsa ini menuju masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran.

(J. Sitanggang SH, berpangkat Iptu, adalah Kaur Jarkom Bid Telematika Polda Riau)



HUT KE-60 POLAIRUD



EKSISTENSI DALAM KETERBATASAN



COBA bayangkan, apa yang akan Anda lakukan untuk menjaga wilayah sebuah negara kepulauan terbesar dunia dengan wilayah ditambah ZEE sekitar 6 juta km²? Sebuah wilayah laut amat luas dengan -- seperti diungkapkan Dir Pembedayaan Pulau-pulau Kecil, Dr. Ir. Toni Ruchimat, M.Sc -- 17.480 pulau dan 92 pulau kecil yang di antaranya merupakan pulau-pulau kecil terluar (PPKT), tersebar di 20 provinsi dan berbatasan dengan 10 negara, 32% di antaranya berpenduduk dan memiliki kandungan sumber daya alam khususnya ekosistem pesisir dan laut beserta biota yang hidup di dalamnya.